

ANALISIS SITUASI DAN KONDISI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF GENDER DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Endry Fatimaningsih

Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung;

Telp. (0721) 704626, 701609 Pesawat 512; Contact Person : 081369047398;

E-mail : end_f@telkom.net

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini lebih diarahkan pada upaya untuk menganalisis tentang situasi dan kondisi perempuan dalam perspektif gender di Kabupaten Lampung Tengah. Tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan data skunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen kabupaten. Data-data tersebut kemudian diolah dan dianalisa secara deskriptif dengan perspektif gender. Penelahan pustaka juga dilakukan untuk memperkaya dan mempertajam analisa data yang dilakukan. Data yang telah diolah dan dianalisa, kemudian disajikan sebagai informasi tentang situasi dan kondisi perempuan di Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan analisis data terpilah tentang situasi dan kondisi perempuan di Kabupaten Lampung Tengah diketahui: *pertama*, dari aspek kependudukan, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Lampung Tengah yang mencapai 48,8% merupakan potensi pembangunan yang perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik. *Kedua*, di bidang pendidikan, kuantitas dan kualitas perempuan masih relatif tertinggal dibanding laki-laki, Hal ini dapat dicermati dari data rata-rata lama sekolah, angka melek aksara, dan APS. *Ketiga*, dalam bidang kesehatan, terbatasnya sarana dan prasarana yang mudah terjangkau perempuan dan ketergantungan perempuan pada laki-laki untuk pengambilan keputusan yang berdampak pada kesehatan perempuan masih tinggi, seperti penentuan untuk ke dokter, keikutsertaan KB, penanganan gagal KB, periksa kehamilan, hingga persalinan, dan lain sebagainya. *Keempat*, di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, rendahnya kontrol perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. *Kelima*, di bidang politik, partisipasi perempuan dalam bidang pengambilan keputusan, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif sangat terbatas.

Kata Kunci : situasi dan kondisi, perempuan, gender

PENDAHULUAN

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 disebutkan bahwa salah satu dari lima sasaran pokok yang berkaitan dengan agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis adalah terjaminnya keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan yang tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, program pembangunan, dan kebijakan publik. Dalam kaitan ini Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai kapasitas fungsi dalam perumusan berbagai kebijakan yang responsif gender, telah menetapkan prioritas sasaran kepada peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Agenda dan prioritas di atas ternyata masih sulit diwujudkan, terutama tatkala adanya kenyataan yang menunjukkan masih banyak permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak.

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dicermati dari analisis-analisis terhadap kondisi dan posisi perempuan yang relatif tertinggal dibanding laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. *Di bidang pendidikan*, data yang ada menunjukkan, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin berkurang peserta didik perempuan; tingginya angka putus sekolah dan buta huruf anak perempuan; serta masih banyaknya materi bahan ajar yang bias gender dan diskriminatif. *Di bidang kesehatan*, permasalahan yang sering muncul adalah berkaitan dengan tingginya angka kematian ibu melahirkan (AKI di Indonesia adalah tertinggi di ASEAN, 307 per 100.000 kelahiran

hidup); rendahnya status gizi ibu hamil dan menyusui; rendahnya kontrol perempuan dalam kesehatan reproduksi dan keluarga berencana; serta rendahnya partisipasi dan tanggung jawab laki-laki dalam kesehatan keluarga dan dalam ber-KB. *Di bidang ekonomi*, permasalahan dilihat dari terbatasnya akses perempuan untuk berusaha di bidang ekonomi produktif, termasuk akses untuk mendapat modal, pelatihan usaha, program perluasan kesempatan kerja dan informasi pasar yang dapat mendorong kemandirian dalam berwirausaha. *Di bidang politik atau kekuasaan pengambilan keputusan*, dapat dicermati pada rendahnya persentase perempuan yang menjadi wakil rakyat (anggota DPR dan DPRD, sebagai hakim, sebagai PNS, sebagai pejabat Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, sebagai camat, dan sebagai pejabat struktural dan fungsional. Hal ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan di bidang pengambilan keputusan. Sementara *di bidang hukum*, masih terdapat undang-undang dan peraturan yang bias gender, sehingga perempuan belum memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya secara penuh.

Permasalahan lain yang tak kalah serius adalah kekerasan dan perdagangan manusia serta perlindungan anak. Kekerasan terhadap perempuan masih dialami cukup banyak perempuan Indonesia dari berbagai kalangan dan latar belakang sosial-ekonomi dan tingkat pendidikan. Perlindungan anak, merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius di masa akan datang dan sekaligus sebagai bentuk komitmen untuk implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana diketahui, anak merupakan aset yang sangat berharga, baik bagi kehidupan keluarga maupun bagi kelangsungan suatu bangsa di masa yang akan datang. Munculnya fenomena buruh/pekerja anak, peradilan anak/anak bermasalah dengan hukum, pelecehan seksual pada anak, anak jalanan, perdagangan anak, penculikan anak, anak putus sekolah, anak cacat, balita gizi buruk, kematian bayi, dan kematian balita merupakan bukti atau bahkan tuntutan bila nasib anak perlu diperhatikan secara lebih serius.

Hingga saat ini persoalan-persoalan di atas masih menjadi persoalan umum yang dihadapi hampir seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Melalui perspektif gender dapat dipahami bahwa keberadaan masalah tersebut sangat erat kaitannya dengan hubungan yang timpang atau tidak setara antara laki-laki dan perempuan, antara orang tua dengan anak, dan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Hubungan yang timpang memanifestasi dalam sikap dan perilaku individu yang bias gender dalam kehidupan sehari-hari, dan lebih memprihatinkan lagi ketika sikap dan perilaku tersebut telah terlegitimasi oleh budaya masyarakat dan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Ketimpangan-ketimpangan tersebut dapat terlihat jelas melalui sajian data terpilah menurut jenis kelamin yang kemudian dianalisis dengan empat dimensi gender yang meliputi: akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat.

Penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan: “bagaimana situasi dan kondisi perempuan di Kabupaten Lampung Tengah?” Analisis terhadap situasi dan kondisi perempuan di Kabupaten Lampung Tengah tersebut diharapkan akan mampu memberikan informasi dan data akurat mengenai kualitas hidup perempuan di wilayah Lampung Tengah.

METODE PENELITIAN

Berkaitan dengan upaya untuk mencapai tujuan penelitian, maka tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif analisis. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen kabupaten, seperti: Lampung Tengah Dalam Angka, Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Tengah.

Data-data tersebut kemudian diolah dan dianalisa secara deskriptif dengan perspektif gender. Penelaahan pustaka juga dilakukan untuk memperkaya dan mempertajam analisa data yang dilakukan. Data yang telah diolah dan dianalisa, kemudian disajikan sebagai informasi tentang kondisi dan situasi perempuan di Kabupaten Lampung Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi dan Kondisi Perempuan di Kabupaten Lampung Tengah

Untuk mendapatkan gambaran tentang situasi dan kondisi perempuan di Lampung Tengah, maka akan disajikan peta kependudukan, pendidikan, kesehatan, rumah tangga dan kegiatan ekonomi.

1. Kependudukan

Penduduk yang berdiam di suatu wilayah merupakan sumber daya yang penting bagi pembangunan di wilayah yang bersangkutan kalau kualitasnya baik, dan sebaliknya dapat berpotensi sebagai penghambat pembangunan atau hanya menjadi beban pembangunan kalau buruk kualitasnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2004 adalah 1.109.884 jiwa, yang terdiri dari 535.862 jiwa penduduk perempuan (48,28%) dan 574.022 jiwa penduduk laki-laki (51,72%) dengan sex ratio 107. Bila dibandingkan dengan tahun 2003 jumlah penduduk mengalami penambahan hampir 12.000 jiwa. Di mana pada tahun 2003 jumlah penduduk adalah 1.097.947 jiwa, yang terdiri dari perempuan 530.009 jiwa dan laki-laki 567.848 jiwa (BPS, 2004).

Komposisi penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2004, sekitar 31,55 persen merupakan penduduk di bawah usia 15 tahun, sekitar 63,65 persen merupakan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun), dan sekitar 4,8 persen merupakan penduduk usia tua (65 tahun ke atas) (Bappeda Lampung Tengah, 2005).

2. Pendidikan

Analisa terhadap kondisi-kondisi pendidikan tersebut sangat penting, terutama untuk mencermati kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti kelompok perempuan. Kaum perempuan merupakan bagian dari potensi sumberdaya manusia yang perannya sangat diharapkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan kualitas sumberdaya perempuan melalui pendidikan juga akan bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan bersaing perempuan di pasar kerja sehingga posisi perempuan dalam pekerjaan semakin baik dengan upah yang semakin tinggi. Peningkatan kualitas pekerjaan yang ditekuni perempuan dan upah yang diperoleh perempuan akan meningkatkan pendapatan keluarga dan pendapatan daerah serta pendapatan negara. Meningkatnya pendapatan keluarga berarti meningkatnya kualitas konsumsi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan keluarga seperti kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Rata-rata lama sekolah merupakan salah-satu indikator dari kondisi tingkat pendidikan penduduk secara umum. Dua indikator lainnya adalah angka melek aksara dan angka buta aksara (tingkat keaksaraan) penduduk.. Ketiga indikator tersebut merupakan komponen untuk menggambarkan tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh penduduk secara umum.

Apabila dilihat menurut jenis kelamin, memperlihatkan rata-rata lama sekolah laki-laki lebih lama dari perempuan baik pada tahun 1999 maupun 2002. Kondisi pada tahun 2002, rata-rata lama sekolah 6,4 tahun untuk perempuan, dapat dikatakan bahwa rata-rata sekolah anak perempuan di Kabupaten Lampung Tengah baru sampai dengan jenjang pendidikan sekolah dasar (SD); sedang untuk anak laki-laki sebesar 7,4 tahun menunjukkan bahwa jenjang pendidikan anak laki-laki mencapai sekolah menengah SLTP). Hal tersebut menunjukkan secara umum ketertinggalan pendidikan kaum perempuan dibanding laki-laki, pencapaian rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Ini berarti ada permasalahan yang dihadapi perempuan dalam menempuh pendidikan, terutama dalam hal akses dan kontrol.

Indikator pendidikan lainnya adalah tingkat keaksaraan. Apabila dilihat menurut jenis kelamin pada tahun 2003 memperlihatkan angka buta huruf perempuan pada kelompok usia 10-14 dan 15-24 lebih rendah dari laki-laki dengan kondisi angka yang terpaut relatif kecil hanya berkisar 1-

1,5 %, sedang pada kelompok usia 25-44 dan kelompok usia 45 keatas memperlihatkan kondisi sebaliknya, angka buta huruf perempuan lebih tinggi daripada laki-laki dengan kondisi angka terpaut relatif besar 5-6% untuk kelompok usia 24-44, dan sekitar 20% untuk kelompok usia 45 tahun keatas.

Sementara itu, tingkat keaksaraan penduduk jika dicermati dari data-data angka melek aksara akan diperoleh informasi yang lebih lengkap, terlebih dengan analisa pada kondisi yang didasarkan pada pemilahan daerah. Persentase angka melek aksara di daerah perkotaan relatif lebih tinggi daripada daerah pedesaan pada semua kelompok usia. Di daerah perkotaan, angka melek aksara pada kelompok usia 10-14, 15-24, dan 25-44 pada tahun 2003 menunjukkan persentase yang relatif bagus, yakni mencapai 100,00. Sedangkan untuk kelompok 45 keatas, angka melek aksara untuk laki-laki adalah 97,23 dan untuk perempuan 93,12. Sementara, untuk daerah pedesaan, persentase 100,00 baru dicapai oleh kelompok perempuan dari kelompok usia 10-14 dan 15-24.

Apabila dilihat menurut jenis kelamin, persentase angka melek aksara perempuan di perkotaan lebih rendah daripada laki-laki pada kelompok usia 25-44 dan 45 keatas. Kondisi yang demikian tak jauh berbeda dengan gejala yang terjadi di pedesaan, yakni angka melek aksara perempuan di pedesaan juga relatif lebih rendah daripada laki-laki.

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan indikator untuk mengetahui cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah. Angka partisipasi sekolah menggambarkan jumlah kelompok usia tertentu yang sedang sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, memperlihatkan APS perempuan pada kelompok usia 7-12 dan 13-15 lebih tinggi daripada laki-laki, baik pada tahun 2001 maupun 2003. Sedangkan pada kelompok usia 16-18, APS perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

3. Kesehatan

Peran perempuan dalam kesehatan sangat vital terutama dalam mendukung kesehatan anak dan balita dan keluarga pada umumnya. Perempuan memiliki fungsi penyedia kesehatan (*health provider*) bagi anggota keluarga, dan sebagai agen sosialisasi nilai-nilai hidup sehat. Perempuan dengan kondisi kesehatan reproduksi yang baik akan berdampak pada kualitas kehamilan dan kelahiran yang baik (aman) dan juga akan dapat melahirkan seorang bayi yang sehat (tidak cacat). Untuk melihat gambaran umum mengenai tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Lampung Tengah secara keseluruhan dapat digunakan indikator-indikator kesehatan penduduk, antara lain meliputi : angka keluhan, angka kesakitan, umur harapan hidup waktu lahir dan angka kematian bayi. Indikator-indikator kesehatan lainnya yang juga perlu diperhatikan antara lain : persentase penduduk yang melakukan pengobatan sendiri, kelahiran yang ditolong medis, rata-rata lama sakit, dan status gizi.

Salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk adalah keluhan kesehatan. Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan menurut jenis kelamin pada tahun 2002 lebih banyak perempuan (20,21%) meskipun untuk laki-laki tidak jauh berbeda (18,1%).

Apabila dilihat indikator kesehatan lainnya, angka kesakitan, menunjukkan angka kesakitan penduduk Kabupaten Lampung Tengah persentasenya untuk laki-laki 8,5 dan 8,2 untuk perempuan. Sementara apabila dilihat menurut jenis kelamin, ternyata angka kesakitan perempuan lebih rendah dari laki-laki.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah imunisasi dan status gizi. Imunisasi berkaitan erat dengan peningkatan kualitas kesehatan penduduk. Pemberian imunisasi kepada bayi dan balita bermanfaat untuk mencegah beberapa jenis penyakit tertentu. Data yang ada dari Dinas Kesehatan Lampung Tengah menunjukkan, pada tahun 2003 terdapat jumlah bayi yang diimunisasi secara lengkap 23.021 bayi atau sekitar 83,6 % yang terdiri dari 11.906 bayi laki dan

11.115 bayi perempuan dari seluruh bayi yang lahir ada di Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 27.535 bayi. Kondisi ini menunjukkan tingginya partisipasi dalam imunisasi.

Gambaran tentang status gizi balita perempuan memperlihatkan kondisi yang relatif seimbang dengan status gizi balita laki-laki, sebagian besar dari mereka atau sekitar 88% berada pada status gizi baik, dan hanya sekitar 9% balita yang berada pada status gizi buruk dan kurang, dan sisanya sekitar 3% balita berada pada status gizi lebih.

Kecenderungan peningkatan umur harapan hidup terjadi pada baik laki-laki maupun perempuan, dari 64,8 tahun untuk laki-laki dan 68,7 tahun untuk perempuan pada tahun 1999 menjadi 65,2 tahun untuk laki-laki dan 69,1 tahun untuk perempuan pada tahun 2002. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, menunjukkan umur harapan hidup perempuan relatif lebih tinggi daripada laki-laki baik pada tahun 1999 maupun pada tahun 2002.

Apabila mencermati data angka kematian bayi, memperlihatkan persentase angka kematian bayi laki-laki lebih tinggi daripada bayi perempuan pada tahun 2002, sementara apabila dibandingkan dengan rata-rata angka kematian bayi propinsi, Kabupaten Lampung Tengah persentasenya di bawah rata-rata angka kematian bayi tingkat propinsi baik untuk bayi laki-laki maupun perempuan.

Kesenjangan juga terjadi dalam penggunaan alat kontrasepsi. Partisipasi laki-laki dalam ber-KB relatif masih sangat rendah bahkan mengalami penurunan persentase, hal ini ditunjukkan oleh rendahnya cara KB laki-laki yaitu MOP/Vasektomi dan kondom. Pada tahun 2002 mencapai hanya sekitar 1,94% akseptor yang menggunakan MOP/Vasektomi dan 0,23% menggunakan kondom atau totalnya hanya sekitar 2,17%. Persentase tersebut relatif tak berubah pada tahun 2003. Dengan demikian jelaslah bahwa KB masih menjadi urusan perempuan saja.

4. Kegiatan Ekonomi

Masalah ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan umat manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Masalah ketenagakerjaan tak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, namun juga berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat

Dalam hal ketenagakerjaan, menurut perundang-undangan tidak ada lagi diskriminasi antara perempuan dan laki-laki untuk bekerja. Meskipun demikian ditemukan banyak permasalahan-permasalahan yang terkait dengan perempuan dan laki sebagai tenaga kerja misalnya jam kerja, upah, pendidikan. Data di bawah ini menjelaskan tentang permasalahan tersebut.

TPAK dan TPT berdasarkan jenis kelamin akan memberikan kejelasan tentang kemungkinan adanya kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam hal ketenagakerjaan. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, terlihat TPAK di Kabupaten Lampung Tengah untuk laki-laki mengalami peningkatan dari 87,2% pada tahun 1999 menjadi 89,4% pada tahun 2002. Sementara untuk TPAK penduduk perempuan justru mengalami penurunan persentase dari 56,5% pada tahun 1999 menjadi 49% pada tahun 2002. Dengan demikian selama tiga tahun terakhir TPAK penduduk laki-laki mengalami kenaikan sebesar 2,2% , sementara TPAK penduduk perempuan selama tiga tahun terakhir turun sebesar 7,5%. Data lain tentang jumlah pencari kerja menunjukkan pada tahun 2002 jumlah laki-laki pencari kerja lebih besar dari pada perempuan, yakni mencapai 59,81 % (3843 orang dari total seluruh pencari kerja sekitar 6425 orang), dan sisanya 40,19 % adalah perempuan. Sementara pada tahun 2003, terjadi penurunan jumlah pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan. Hal yang menarik untuk dicermati adalah pada tahun sama jumlah laki-laki pencari kerja lebih kecil daripada jumlah perempuan pencari kerja dengan perbandingan 46,09% untuk laki-laki dan 53,91% untuk perempuan.

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan pencari kerja, baik pada tahun 2002 ataupun tahun 2003, jumlah pencari kerja yang tertinggi adalah pencari kerja yang berlatar belakang pendidikan SLTA. Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah terjadinya kecenderungan

penurunan jumlah pencari kerja yang berlatar belakang pendidikan SLTA kebawah, dan peningkatan jumlah pencari kerja yang berlatar belakang pendidikan Sarjana muda/DIII dan Sarjana.

Sementara itu, berkaitan dengan masalah pengangguran secara rinci dapat diamati, jenis pengangguran yang persentase tertinggi adalah setengah pengangguran sukarela. Jenis pengangguran ini biasanya terjadi pada kelompok ibu rumah tangga, yang sebenarnya mereka masih memiliki waktu luang namun tidak berkeinginan untuk mencari kerja.

Dalam hal upah/gaji, perbedaan upah antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki masih saja terjadi. Ketimpangan yang sangat besar terjadi pada pekerja yang bekerja di sector non-pertanian.

5. Bidang Politik

Di Kabupaten Lampung Tengah, kiprah perempuan dalam politik pertama-tama dapat dilihat dari komposisi perempuan dalam kepengurusan partai politik. Data menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat di dalam bidang politik, hanya saja apabila dibandingkan dengan laki-laki keterlibatan perempuan jauh lebih rendah, hanya sekitar 19% perempuan yang duduk di lembaga legislatif. Kondisi tak jauh berbeda juga terjadi pada lembaga eksekutif, berdasarkan golongan ruang, maka persentase pegawai negeri perempuan akan makin sedikit dengan makin tingginya golongan pangkat. Pangkat tertinggi yang telah dicapai oleh pegawai negeri perempuan di Kabupaten Lampung Tengah adalah IVb. Diantara pegawai golongan IV terdapat 12 orang perempuan atau sekitar 8,4 persen dari total pegawai golongan IV. Persoalan sedikitnya perempuan berpolitik lebih disebabkan karena ada faktor sosial budaya

Berikut ini akan disajikan data mengenai jumlah pegawai negeri sipil dalam lingkungan pemerintahan kabupaten Lampung Tengah yang dipilah menurut jenis kelamin berdasarkan tempat kerja, eselon, pangkat golongan, dan pendidikan pada tahun 2002. Data diperoleh dari hasil survei kesemua instansi di Kabupaten Lampung Tengah dan Daftar Urut Kependudukan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) per Desember 2002. Data dari instansi terutama untuk mencatat data pegawai honorer dan petugas lapangan yang belum atau tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Data pegawai yang bersumber dari survei instansi ini juga terutama untuk mengumpulkan data yang tidak tercatat oleh BKD karena mereka pegawai pusat, misalnya BPS, BKKBN, dan Departemen Agama. Data mengenai sebaran eselon, golongan pangkat, dan eselon terutama bersumber dari data Badan Kepegawaian Daerah per Desember 2002.

Analisis Indikator Rendahnya Kualitas Hidup Perempuan

Berdasarkan analisis data terpilah yang telah disajikan dalam kondisi dan potensi wilayah Kabupaten Lampung Tengah, maka dapat diketahui tingkat akses, kontrol, dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang. Akses, kontrol dan partisipasi merupakan indikator pemberdayaan perempuan di Kabupaten Lampung Tengah. Indikator tersebut dapat dirinci dalam bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi-ketenagakerjaan, dan politik.

Dari aspek kependudukan, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Lampung Tengah yang mencapai 48,8% merupakan potensi pembangunan yang perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Apalagi tatkala mencermati, sebagian besar dari mereka adalah berada dalam struktur usia yang masih tergolong produktif. Upaya pengembangan potensi penduduk perempuan harus didasarkan pada pengetahuan tentang kondisi mereka, termasuk analisis tentang ketertinggalan mereka dalam pembangunan di banding dengan laki-laki.

Di bidang pendidikan, kuantitas dan kualitas perempuan masih relatif tertinggal dibanding laki-laki. Kesamaan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh pendidikan, baik formal maupun informal memang tidak ada perbedaan. Namun, peluang ini tereduksi dengan konstruksi budaya yang menyatakan perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena posisi perempuan nantinya akan selalu berada di rumah tangga. Ketertinggalan

perempuan di bidang pendidikan dapat dicermati pada pertama, rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kondisi pada tahun 2002, rata-rata lama sekolah 6,4 tahun untuk perempuan, sedang untuk anak laki-laki sebesar 7,4 tahun. Kedua, persentase angka melek aksara perempuan lebih rendah daripada laki-laki pada kelompok usia 25-44 dan 45 keatas baik di pedesaan maupun perkotaan. Ketiga, APS perempuan lebih rendah daripada laki-laki, terutama pada kelompok usia 16-18. Di samping itu, semakin tinggi jenjang pendidikan, partisipasi perempuan dalam pendidikan juga memperlihatkan gejala yang semakin menurun.

Permasalahan lain di bidang pendidikan yang dapat dicermati adalah rendahnya kontrol perempuan dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari indikator keputusan untuk melanjutkan sekolah tidak berada di tangan perempuan tetapi keluarga, yang dalam hal ini di dominasi laki-laki. Akibatnya, jumlah perempuan pada tingkat pendidikan tinggi dan jurusan-jurusan tertentu sangat terbatas, sehingga perempuan belum dapat menikmati program dan kegiatan pendidikan di semua jenjang. Di samping itu, masih pula terdapat kegiatan pendidikan dan program yang tidak tepat dalam rangka peningkatan kualitas perempuan, seperti kurikulum yang bias gender.

Dalam bidang kesehatan, kualitas perempuan juga menuntut untuk ditingkatkan. Indikator yang perlu diperhatikan adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang mudah terjangkau perempuan, baik untuk pencegahan penyakit maupun pengobatan, sehingga ketergantungan perempuan pada laki-laki untuk pengambilan keputusan yang berdampak pada kesehatan perempuan masih tinggi, seperti penentuan untuk ke dokter, keikutsertaan KB, penanganan gagal KB, periksa kehamilan, hingga persalinan, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dicermati pada persentase penduduk perempuan (20,21%) yang mempunyai keluhan kesehatan pada tahun 2002 lebih banyak dibanding laki-laki (18,1%) dan peran aktif perempuan dalam keluarga berencana relatif selalu sangat tinggi dibanding laki-laki. Rendahnya kualitas kesehatan perempuan masih terasa pula akibat dari konstruksi budaya yang menempatkan kualitas gizi untuk anak laki-laki dan suami jauh lebih penting daripada anak perempuan. Permasalahan lain yang perlu dicermati adalah rendahnya pemahaman perempuan tentang kesehatan reproduksi.

Dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, kualitas perempuan masih perlu ditingkatkan. Indikator yang perlu dicermati adalah perempuan sudah memasuki berbagai lapangan usaha, namun masih banyak perempuan yang mendapat bayaran di bawah batas upah minimum regional (UMR). Hal ini disebabkan Undang-Undang Ketenagakerjaan belum dapat di implementasikan secara baik, sehingga budaya membatasi kesempatan kerja dan pembayaran upah rendah bagi perempuan tetap ada. Ketimpangan yang sangat besar terjadi pada pekerja perempuan yang bekerja di sector non-pertanian. Indikator lain yang perlu pencermatan adalah persentase pengangguran sukarela. Jenis pengangguran ini biasanya terjadi pada kelompok ibu rumah tangga, yang sebenarnya mereka masih memiliki waktu luang namun tidak berkeinginan untuk mencari kerja mencapai 51,4% sementara laki-laki hanya sekitar 26,9%. Rendahnya kontrol perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan merupakan permasalahan lain yang juga perlu diperhatikan. Pengambilan keputusan bekerja yang masih relatif ditentukan oleh laki-laki, keluarga, anak, dan budaya. Akibatnya, perempuan memiliki kesempatan yang rendah dibandingkan laki-laki untuk memperoleh kesempatan kerja di sektor formal.

Dalam bidang politik, kemampuan perempuan Kabupaten Lampung Tengah masih perlu ditingkatkan. Partisipasi perempuan dalam bidang pengambilan keputusan, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif sangat terbatas. Akses perempuan di bidang politik ditandai dengan indikator bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dan tidak ada pembatasan secara tegas dan formal tentang perbedaan hak dan kewajiban perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan. Namun, budaya dan interpretasi agama telah berkontribusi terhadap munculnya anggapan perempuan tidak pantas berpolitik, memimpin, dan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan baik di lembaga legislatif (perempuan hanya 19%) maupun yudikatif didominasi laki-laki, karena jumlah perempuan yang terlibat dalam posisi dan peran sebagai pengambil keputusan masih sedikit, sehingga banyak keputusan yang diambil belum rnemihak kepada perempuan. Hal ini juga akibat dari partisipasi perempuan sebagian besar masih dalam tahap partisipasi pasif dan bahkan

cenderung menjadi objek politik. Begitupula di lembaga eksekutif, memperlihatkan gejala yang tak berbeda, ketimpangan terjadi tak hanya pada kuantitas pegawai perempuan secara umum, namun juga kuantitas Pegawai Negeri Sipil perempuan yang menempati eselon ring (sebagai legitimasi pengambilan keputusan). Dari posisi jabatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, 93,75 persen ditempati laki-laki.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian dan analisis penelitian di atas, dapat disimpulkan di Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana lazimnya daerah-daerah lain di Indonesia, perempuan dalam konteks pembangunan daerah masih dalam kondisi yang belum memuaskan. Kenyataan ini ditunjukkan dengan rendahnya partisipasi, kontrol dan akses perempuan dalam berbagai bidang pembangunan serta sedikitnya perempuan yang memperoleh manfaat dari pembangunan. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan dari penelitian adalah penguatan komitmen dan upaya yang lebih sungguh-sungguh untuk melaksanakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga kualitas hidup perempuan dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, Gadis, 1999, " Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan" dalam *Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen Terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Fakih, Mansour, 2001, *Analisa Gender dan Transformasi Gender*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Purnama, Lita, "Apa Kabar Perempuan Daerah?". *Jurnal Perempuan No 17*, , Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Meneg PP, 2005, *Rencana Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan 2005-2009*.
- BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2004, *Lampung Tengah dalam Angka*
- BPS, Kabupaten Lampung Tengah, 2004, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah 2004*
- BPS, Kabupaten Lampung Tengah, 2004, *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Tengah 2004*
- Bappenas, UNDP dan BPS. 2004. *"Indonesia Human Development Report 2004"*.